

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN HUKUM PEJABAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Nama : Anna Tifanny Eboresi

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hak kekebalan hukum pejabat KSSK yang diatur dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Jo UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mana ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap kebijakan pejabat KSSK bukan merupakan kerugian negara dan tidak dapat dihukum baik pidana, perdata dan bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Secara normatif dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak adanya batasan dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekebalan hukum pejabat KSSK menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pada hakekatnya pejabat KSSK yang memiliki hak kekebalan hukum tersebut terikat kode etik sebagaimana diatur pada UU Nomor 5 Tahun 2014 sehingga meskipun memiliki hak kekebalan hukum, tetapi tetap menjalankan tugas dengan baik dan sesuai Undang-Undang dan tunduk pada kode etik yang berlaku.

Kata Kunci: *equality before the law*, Hak kekebalan hukum, kode etik

TITLE : JURIDIC REVIEW OF OFFICERS' IMMUNITY RIGHTS IN LAW
NUMBER 2 OF 2020 CONCERNING STATE FINANCIAL POLICY AND
FINANCIAL SYSTEM STABILITY IN HANDLING THE 2019 CORONA VIRUS
DISEASE PANDEMIC

Name : Anna Tifanny Eboresi

Discipline/ Study Programme : Legal Studies

Contributor : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. and Dr. H. Didik

Widitrisniharto, S.H., M.Si.

ABSTRACT

This thesis discusses the provisions on the legal immunity rights of KSSK officials as regulated in Article 27 of Perppu Number 1 of 2020 in conjunction with Law Number 2 of 2020 which stipulates that every policy of KSSK officials is not a loss to the state and cannot be punished either criminally, civilly or not. is the object of a State Administration lawsuit. This provision is contrary to the principle of equality before the law as regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. Normatively in the hierarchy of laws and regulations as regulated in Article 7 paragraph (1) Law Number 12 of 2011 stipulates that lower level may not conflict with higher laws and regulations. The absence of further limits and provisions regarding the impunity rights of KSSK officials creates legal uncertainty and can lead to abuse of power. In essence, KSSK officials who have the right to immunity are bound by a code of ethics as regulated in Law Number 5 of 2014 so that even though they have the right to immunity, they still carry out their duties properly and according to the law and are subject to the applicable code of ethics.

Keywords: equality before the law, the right to immunity, code of ethics